



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270/010/II/KPU/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN CILACAP UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
DI KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Cilacap Utara** di Kabupaten Cilacap.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan-Bantuan Fasilitas Pemerintah daerah Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009;

Memperhatikan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan **Cilacap Utara** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap yang susunannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Dictum Pertama mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban, meliputi :

- a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggara Pemilu di tingkat Desa / Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tanggapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam penyelenggaraan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) **Cilacap Utara** berkewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 0154.0/999-06.1/-/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dialokasikan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor : 270/40/VI/KPU/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

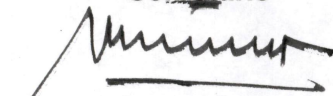
Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 31 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,

ttd

WARSID

SALINAN sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris



USNANTO

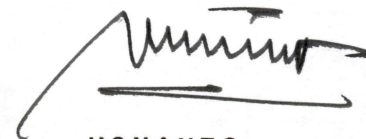
NIP. 19620408 198607 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 270/010/I/KPU/2009
TANGGAL : 31 JANUARI 2009

**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN CILACAP UTARA
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
1	SUGENG TASWIN	CILACAP, 18 - 03 - 1966	ANGGOTA PPS KEL. MERTASINGA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	STM
2	PUJI HARTATI, S.Pd	BANYUMAS, 17 - 02 - 1969	" - "		SARJANA
3	EDI HARTOYO, SE	CILACAP, 18 - 07 - 1963	" - "		SARJANA
4	ARIF TRIMO HARTOYO, ST	CILACAP, 12 - 04 - 1982	ANGGOTA PPS KEL. KARANGTALUN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
5	SUPRIYADI	CILACAP, 09 - 01 - 1974	" - "		STM
6	DANANG WISNU TRIAYATMOKO	CILACAP, 20 - 01 - 1977	" - "		SARJANA
7	NARSO, S. Sos	CILACAP, 02 - 05 - 1965	ANGGOTA PPS KEL. KEBONMANIS	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
8	SUPARTINI	CILACAP, 01 - 05 - 1963	" - "		SLTA
9	SUTARNO ATW	PURBALINGGA, 27 - 02 - 1962	" - "		SLTA
10	NARDJO	BANYUMAS, 08 - 06 - 1948	ANGGOTA PPS KEL. TITIH KULON	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D2
11	OEJI ANTORO	CILACAP, 09 - 11 - 1972	" - "		STM
12	RATIMAN	CILACAP, 01 - 12 - 1952	" - "		SLTA
13	SANA RANA SUHARJO	CILACAP, 05 - 02 - 1950	ANGGOTA PPS KEL. GUMILIR	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
14	SUTARSUN	CILACAP, 10 - 04 - 1968	" - "	" - "	D3
15	YETI KURNIATI	CILACAP, 22 - 08 - 1967	" - "	" - "	SLTA

SALINAN sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris,



USNANTO
19620408 198607 1 002

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 31 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,

ttd

WARSID